

ABSTRAK

FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

ZULKARNAIN

Berdasarkan data potensi pertanian Kabupaten Pesawaran (BPS Pesawaran, 2010). Produktivitas dari tujuh kecamatan yang ada, Kedondong memiliki produktivitas pertanian dan perkebunan tertinggi pada delapan komoditas, tersebut selanjutnya Kecamatan Padang Cermin memiliki produktivitas tertinggi enam komoditas. Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Gedong Tataan memiliki produktivitas tertinggi di tiga komoditas. Kecamatan Punduh Pidada memiliki produktivitas tertinggi di dua komoditas, dan yang terakhir Kecamatan Way Lima memiliki produktivitas tertinggi di satu komoditas. Oleh karena itu Kecamatan Kedondong merupakan kecamatan yang banyak memiliki produktivitas tertinggi di beragam komoditas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Pesawaran, dalam tahap perumusan masalah (*defining problem*), agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, tahap penetapan kebijakan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif (menggambarkan) dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai formulasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan diketahui bahwa perumusan masalah kebijakan pada kebijakan pengembangan agropolitan didasarkan pada kebutuhan akan perencanaan pada sektor pertanian terkait pembangunan daerah namun tidak ada masalah publik pada masyarakat yang akan diselesaikan secara spesifik. Keberadaan raperda pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Pesawaran lebih kepada mengikuti rencana tata ruang nasional tanpa urgensi akan permasalahan publik. Pemilihan alternatif kebijakan pengembangan kawasan agropolitan berlangsung hanya pada tata naskah, kurang menyentuh pada sisi substansi kebijakan. Secara keseluruhan proses perumusan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan adalah keputusan kaum elite, karena tidak adanya partisipasi langsung masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perumusan Kebijakan, Pengembangan Kawasan Agropolitan